
Social Movement Ala Seniman Kota Yogyakarta Dalam Meramaikan Kontestasi Demokrasi Lokal

Ammar Rahmat¹, Amalinda Savirani²

^{1,2} Magister Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah mada

(Penulis korespondensi: ammarrahmatsip@gmail.com)

Received: 12 November 2020; Accepted: 01 December 2020; Published: 08 December 2020

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji gerakan-gerakan sosial baru yang digagas para seniman di kota Yogyakarta, khususnya dalam kaitannya dengan demokrasi lokal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek dalam penelitian ini adalah Jogja Independent (JOINT) dan Komik Media Sosial (@stripjogja). JOINT dan Komik Media Sosial dipilih karena kedua gerakan tersebut mewakili dua kutub yang berbeda. Wawancara mendalam digunakan untuk mengungkap fakta-fakta yang ditemukan, informan dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. JOINT dan Komik Media Sosial merupakan gerakan sosial baru yang tidak lagi fokus pada persoalan perebutan sumber daya ekonomi, hal ini dikarenakan JOINT dan Komik Media Sosial sama-sama merupakan wadah seniman untuk menyalurkan aspirasi politik. JOINT dan Komik Media Sosial sama-sama telah melalui 3 fase gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh John E. Farley. Tantangan yang dihadapi JOINT adalah masalah pengumpulan KTP, sedangkan Komik Media Sosial dihadapkan pada kondisi jangkauan media sosial yang luas namun tidak bisa fokus pada dapil yang diinginkan.

Keywords: Seniman; Demokrasi Lokal; Gerakan Sosial; Kota Yogyakarta.

Abstract

This study aims to examine the new social movements initiated by artists in the city of Yogyakarta, especially in relation to local democracy. This research is a qualitative study with a case study approach. The objects in this study are Jogja Independent (JOINT) and Komik Media Sosial (@stripjogja). JOINT and Komik Media Sosial were chosen because the two movements represented two different poles. In-depth interviews are used to reveal the facts to be found, informants were selected purposively, and were snowball sampling in nature. JOINT and Komik Media Sosial is a new social movement, which is no longer focused on the issue of struggling for economic resources, this is because JOINT and Social Media Comics are both a forum for artists to channel political aspirations. JOINT and Komik Media Sosial have both gone through 3 phases of social movements as stated by John E. Farley. The challenge faced by JOINT were the problem of gathering ID cards, while Komik Media Sosial were faced with the conditions of the broad reach of social media but cannot focus on the desired electoral districts.

Keywords: Artist; Local Democracy; Social movement; Yogyakarta City.

LATAR BELAKANG

Kontestasi politik tingkat lokal Kota Yogyakarta melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) tentu saja menyeret perhatian banyak kalangan, tak terkecuali mereka para seniman. Seniman, meskipun mereka kerap hanya dianggap oleh publik sebagai kalangan pencipta karya melalui olah rasa tetapi seringkali mereka juga terlibat dalam panggung politik yang mementaskan adu tanding kekuasaan. Iswandi (2016) melihat seni sebagai sarana yang mempunyai kegunaan yang cukup fundamental untuk manusia, termasuk agitasi dalam berbagai pertarungan politik.

Dalam rangkaian catatan sejarah politik bangsa ini, keterlibatan para seniman ke dalam ranah politik bukanlah sesuatu yang baru terjadi. LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional) yang berafiliasi ke PNI, Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang berafiliasi dengan PKI, Lesbumi (Lembaga Seni dan Budaya Muslim) yang menjadi perpanjangan tangan NU, HSBI (Himpunan Seniman dan Budayawan Islam) yang menjadi alat ekspresi MASYUMI, merupakan contoh konkrit begitu lekatnya seniman dengan politik (Setiawan, 2010). Hal ini juga menjadi fakta yang menunjukkan bahwa gerakan seniman yang muncul ke

permukaan bila ditelisik lebih jauh hingga ke belakang panggung kontestasi kekuasaan terdapat relasi kuasa antara politisi dan seniman.

Diskursus tentang hubungan antara seni dan politik sudah sejak lama berlangsung. Perdebatan ini dapat dilacak hingga era filsuf Yunani kuno saat Sokrates, dan kemudian Plato (dalam Politeia) mempertanyakan pertentangan antara filsafat dan puisi. Bila dilihat sekilas, orang akan kesulitan melihat unsur politik di dalam perdebatan itu, namun banyak pula yang meyakini bahwa filsafat, sebagaimana konteks pemikiran Plato, tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan (Most, 2011). Kemudian, Ranciere (2013) melihat seni dialienasi atau teralienasi dari sendi kehidupan masyarakat ketika batas-batas antara seni dan mana yang bukan seni mulai kabur. Dengan berbagai tujuan, “seni” digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk mencapai tujuannya. Rezim yang muncul selama beberapa abad di Eropa dan Amerika telah membentuk persepsi lain tentang seni. Fokus dari seni pada rezim tersebut berpusat pada kemampuan karya-karya dalam “membentuk” cara hidup individu maupun masyarakat (Rancière, 2013).

Seni sebagai alat kekuasaan (baca: politik) dapat terlihat jelas dari ambisi

Stalin dan kroco-kroconya dalam menjadikan apa yang mereka anggap sebagai “seni” sebagai pilar indoktrinasi sekaligus mekanisme kontrol atas masyarakat Soviet kala itu. Stalin berpendapat bahwa penyair haruslah menjadi “insinyur” jiwa manusia, sebuah pesan yang menggambarkan kepercayaannya terhadap kemampuan “seni” dalam upaya rekayasa sosial yang diimpikannya. Untuk mencapai hal tersebut, seni yang bertentangan dengan ide besar Stalin haruslah disingkirkan (Zhdanov, 1998).

Represi yang muncul terhadap seni justru balik menimbulkan ancaman besar bagi para penguasa yang melakukan penindasan terhadap seni tersebut. Sudah banyak contoh dari seluruh penjuru dunia dimana seni merupakan salah satu media yang digunakan sebagai penyampai kritik-kritik sosial dan politik. Di Indonesia sendiri, fenomena ini bisa kita lihat sejak republik ini belum terbentuk. Pada masa penjajahan, wayang menjadi media ekspresi politik yang bertujuan untuk mengobarkan semangat juang melawan para penjajah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa lakon wayang seperti Perang antara Sarapada dengan *celeng* atau macan, dimana kedua binatang tersebut merupakan perlambangan dari penjajah Belanda (Rianto, 2009).

Praktek-praktek perlawanan politik melalui seni bisa dilihat pula dalam sajak-sajak para penyair tersohor seperti Sutan Takdir Ali Syahbana, Chairil Anwar, Gie. Media seni yang digunakan sebagai bentuk ekspresi politik kemudian makin berkembang dengan banyaknya satir politik yang bermunculan melalui lukisan maupun kartun di media-media cetak, baik lokal maupun nasional, yang kerap memotret kondisi sosial dan politik bangsa. Tokoh-tokoh seperti Affandie dan Sudjojono, maupun G.M. Sudarta (melalui karakter Oom Pasikom di Harian Kompas) yang menjadi pioner dalam hal ini.

Pada masa Orde Baru, Sosok Iwan Fals muncul sebagai simbol atas kritik terhadap pemerintah melalui lirik-lirik lagunya yang menohok penguasa. Beberapa lagu-lagunya yang populer seperti Guru Oemar Bakrie, Surat untuk Wakil Rakyat, Bento, Bongkar, dan Manusia Setengah Dewa kerap dijadikan “doping” bagi para demonstran yang anti Orde Baru. Lagu Surat Untuk Wakil Rakyat contohnya, merupakan sebuah lagu yang ditujukan pada para anggota DPR yang kinerjanya jauh dari harapan masyarakat. Tidak hanya media kritik, seni juga sebagai media politik model kampanye kreatif (Arianto, 2015). Seperti grup band Slank yang menjadi ikon Musik

di dalam Pemilu Presiden tahun 2014 di mana mereka mendukung salah satu paslon yakni Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK). Slank aktif menyuarakan dukungannya terhadap Jokowi-JK dengan banyak hadir di kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Slank juga kerap membawakan lagu “salam 2 jari” yang menjadi salah satu *theme song* bagi kampanye Jokowi-JK.

Menarik membicarakan relasi kuasa antara politisi dan seniman, karena pada saat sekarang ini, fenomena semacam ini, secara disadari atau tidak sering muncul ke ruang publik baik nasional ataupun lokal. Penulis melihat ada pergerakan seniman yang memiliki keterkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif di Kota Yogyakarta. Gerakan-gerakan tersebut mewujudkan diri dalam beragam bentuk dan rupa.

Gerakan seniman yang sempat mengemuka adalah pencalonan individual atau perseorangan (*independent*) dari pasangan Garin Nugroho dan Rommy Herryanto sebagai calon walikota dan wakil walikota Yogyakarta. Setahun sebelum Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tersebut dilakukan, sejumlah elemen masyarakat dari berbagai kalangan di Yogyakarta mendeklarasikan Jogja

Independent (JOINT) pada hari Minggu (20/3/2016) yang bertempat di Angkringan Code, Jetisharjo. Fenomena ini merupakan sebuah gerakan kerelawanan yang mencoba muncul untuk mendorong lahirnya bakal calon walikota dan wakil walikota Yogyakarta dari kalangan *independent* atau perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 dengan cara menyeleksi calon-calonnya secara terbuka atau bisa disebut dengan “anti-patronase”.

Beberapa tokoh masyarakat seperti mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD dan mantan ketua Forum Rektor, Edi Suandi Hamid turut menjadi pendiri (Kresna, 2016), ikut serta hadir bersama dengan para tokoh dari berbagai latar belakang seperti para seniman, budayawan, akademisi dan tokoh masyarakat, di antaranya Butet Kartaredjasa, Djaduk Ferianto, Sutradara Garin Nugroho, pengamat Transportasi Danang Parikesit, Akademisi dan Aktifis Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, MC Lusy Laksita, dan beberapa tokoh lainnya yang ikut mendeklarasikan gerakan Jogja Independent (JOINT) ini menganggap

bahwa gerakan ini merupakan salah satu ikhtiar mencari pemimpin Kota Yogyakarta yang benar-benar pilihan masyarakat.

Mencermati keterlibatan para seniman dalam ruang Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif sebagaimana diuraikan di atas, Wilson (1973) menyatakan gerakan sosial merupakan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang secara sadar, bersama-sama, terorganisir dan dengan tujuan yang jelas untuk membawa atau menolak perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Keterlibatan para seniman pada gerakan-gerakan di atas menyebabkan kontestasi kekuasaan di Kota Yogyakarta semakin menarik untuk dikaji. Selain itu, ada pula Komunitas Komik Media Sosial, yakni sebuah gerakan atau komunitas komik *online* yang berlokasi di Kota Yogyakarta, gerakan atau komunitas ini bisa disebut juga dengan gerakan atau komunitas gotong royong yang berbasis media sosial tepatnya Instagram yang diwadahi oleh akun @stripjogja. Keterlibatan @stripjogja ini di dalam dunia politik lokal Kota Yogyakarta semakin kental terasa ketika komunitas ini secara aktif mendukung salah satu anggotanya yang mencalonkan diri sebagai

calon legislatif pada Pemilu Legislatif 2019.

Demokrasi membuka ruang-ruang yang terbuka bagi munculnya beragam bentuk gerakan dan kepentingan dan menjadikannya semakin menarik manakala pelaksanaannya di tingkat lokal yang diwujudkan melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif telah menjadi magnet bagi para seniman di Kota Yogyakarta. Dari peristiwa yang dicontohkan di atas telah mendorong penulis untuk mengidentifikasi dan menganalisis lebih dalam mengenai gerakan-gerakan sosial para seniman dalam ruang Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif di Kota Yogyakarta. Bagaimana gerakan-gerakan sosial yang melibatkan para seniman ini dilakukan hingga motif dan isu yang melatarinya menjadi tema yang menarik bagi penulis untuk mengkajinya lebih dalam. Selain itu, dengan bervariasinya gerakan-gerakan sosial yang ada yang melibatkan para seniman tentu penulis berharap ada celah bagi munculnya pengetahuan baru yang bisa diambil sebagai kontribusi penelitian ini pada bidang ilmu politik khususnya kajian-kajian yang bertema gerakan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai gerakan seniman dalam politik Kota Yogyakarta ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada metode studi kasus dengan beberapa kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian ini bersumber dari sebuah isu atau masalah (*case*), yaitu kemunculan sebuah gerakan bernama JOINT yang melibatkan seniman yang mencoba untuk mendorong lahirnya bakal calon walikota dan wakil walikota Yogyakarta dari kalangan *independent* di pemilihan kepala daerah Kota Yogyakarta tahun 2017, serta gerakan Komik Media Sosial yang mendukung salah satu anggotanya dalam pencalonan di pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Yogyakarta. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Creswell dan Poth (2016) yang mengatakan bahwa, studi kasus merupakan penelitian empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks yang sebenarnya, ketika batas-batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas dan dimana beberapa sumber bukti yang digunakan. Lebih lanjut, penelitian studi kasus melibatkan studi mengenai isu-isu yang dieksplorasi melalui satu atau lebih kasus dalam sistem yang dibatasi.

Dalam sumber data atau informan bukan didasarkan pada kuantitas,

melainkan lebih pada kualitas, sebagaimana ciri penelitian kualitatif pada umumnya. Sementara sumber atau informan dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih berdasarkan orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial yang paling berpengaruh, sehingga mampu membuka pintu kemana peneliti akan mengumpulkan data. Proses pengumpulan data secara umum terdiri dari dua kriteria, yaitu data primer dan data sekunder, data primer meliputi observasi dan wawancara yang terkait dengan subjek penelitian, kemudian didukung dengan data sekunder dalam studi pustaka yaitu publikasi yang terkait dengan seniman di Yogyakarta dan kegiatannya yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 dan Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kota Yogyakarta. Penulis dalam mencari data lapangan menggunakan metode wawancara yang formal dan informal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti ingin mengetahui dan menjelaskan mengenai gerakan sosial kontemporer berbasis media sosial di Indonesia. Penelitian ini sendiri cenderung melihat bahwa gerakan sosial dapat dipahami berdasarkan empat perspektif

yang ada karena pada dasarnya kehadiran sebuah gerakan sosial itu sendiri dapat dipicu oleh ketidakpuasan sumber daya yang tersedia, peluang politik yang berubah atau oleh rekonstruksi sosial mengenai makna (Klandermans, 2005), yang merupakan argumen dasar dari masing-masing perspektif. Untuk keperluan lebih khusus, dalam penelitian ini teori mobilisasi sumber daya akan dipakai sebagai acuan utama tanpa mengesampingkan perspektif-perspektif yang lain.

Gerakan sosial yang tumbuh di kalangan masyarakat pada umumnya bisa disebut sebagai suatu gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dengan tujuan dan kepentingan tertentu, semisal melakukan perlawanan atau bentuk ketidakpuasan terhadap struktur yang ada, termasuk juga usaha dalam menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Tarrow (2011) melihat gerakan sosial sebagai tantangan kolektif/bersama (kepada elit, otoritas, kelompok lain atau peraturan budaya) oleh orang-orang yang mempunyai tujuan yang umum dan solidaritas dalam interaksi yang berkesinambungan dengan elit, oposisi dan otoritas. Lebih lanjut, gerakan sosial dapat dipahami sebagai tantangan terhadap pembuat keputusan dalam upaya

melakukan perubahan sosial tertentu (Ishiyama, Breuning & Syaifuddin, 2013). Dapat dikatakan bahwa sebagian dari perubahan politik yang paling penting pada abad ke-19 dan 20 disebabkan oleh aksi gerakan sosial. Contoh yang jelas adalah gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat, gerakan lingkungan (*green movement*) dan organisasi wanita. Gerakan sosial biasanya dihubungkan dengan perlawanan politik: Gerakan tersebut berusaha menciptakan perubahan politik dengan menantang elite politik. Gerakan sosial juga mewakili suara orang-orang yang disingkirkan dari sistem politik. (Ishiyama, Breuning & Syaifuddin, 2013)

Sebelumnya, kita mengenal ada dua macam gerakan sosial, yaitu *old social movement* dan *new social movement*. *Old social movement* merupakan gerakan yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan sisi materi dan biasanya terkait dengan ketimpangan ekonomi dan atau kelas pada suatu kelompok, seperti kelompok petani atau buruh (Prakarsa dan Triwibowo, 2006). *Old social movement* yang ditandai dengan semakin beragamnya pelaku gerakan sosial dan tidak lagi terpusat pada gerakan kaum buruh dan petani tapi juga merambah kepada Hak Asasi Manusia, perempuan, demokratisasi dan lingkungan hidup yang membuat studi

mengenai gerakan sosial tidak hanya terpusat menjadi kajian sosiologi, tapi juga menjadi kajian ilmu psikologi sosial, ilmu politik, sejarah, lingkungan hidup dan berbagai studi bidang ilmu lain. (Situmorang, 2013). Sedangkan *new social movement*, merupakan tipe gerakan sosial yang memiliki tampilan karakter yang baru atau unik dimana gerakan ini lebih berpusat pada tujuan-tujuan non material, lebih berkaitan dengan ide atau nilai, berorientasi pada isu dan tidak tertarik pada gagasan revolusi. *New social movement* juga bersifat plural, yaitu mulai dari gerakan anti rasisme, anti nuklir, feminisme, kebebasan sipil dan lain sebagainya.

Jika membahas Kota Yogyakarta dan ekspresi politik melalui seni, maka hal yang perlu diperhatikan pertama kali adalah kenyataan bahwa eksistensi dari Kota dan masyarakat Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari seni dan kebudayaan. Stempel “Kota Budaya” yang disematkan pada Kota Yogyakarta tidak terlepas dari kondisi dimana seni dan budaya mendapatkan lahan dan iklim yang kondusif yang dapat membantunya untuk terus tumbuh dan berkembang. Hal ini tercermin dari banyaknya seniman yang berasal dari Kota Yogyakarta mendapatkan pengakuan atas eksistensinya, tidak hanya

dari masyarakat Yogyakarta, tapi juga oleh rakyat Indonesia bahkan sampai masyarakat dunia.

JOINT sebagai Kanal Politik Seniman Yogyakarta

Lahirnya JOINT yang diprakarsai oleh berbagai elemen dalam masyarakat merupakan sebuah wujud keresahan dari masyarakat atas kondisi politik dan pemerintahan yang dirasa belum berjalan dengan baik selama ini, terutama pasca diadakannya pemilihan kepala daerah langsung.

“sebenarnya banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh segenap warga Jogja untuk mewujudkan Kota Jogja yang lebih baik, jalannya si sebenarnya bisa dari mana saja, tapi JOINT ini kebetulan merupakan gerakan yang hadir sebagai respon atas pilkada yang pada saat itu akan berlangsung” (YN)

Gerakan yang berawal dari eksperimen para seniman ini tidak pernah diharapkan untuk menjadi gerakan yang menarik perhatian khalayak ramai. Oleh karenanya, di satu sisi, terlepas dari kegagalan JOINT meloloskan calonnya ke kontestasi pilkada, ada hal-hal yang lain yang jauh melebihi ekspektasi dari JOINT justru terjadi saat itu. Salah satunya adalah bagaimana JOINT bisa memberikan wadah pendidikan politik yang baik bagi

masyarakat Yogyakarta dengan hadirnya para akademisi dan praktisi seperti Profesor Mahfud MD dan Dr. Busyro Muqoddas yang rekam jejaknya tidak diragukan lagi. Dengan begitu, JOINT tidak eksklusif hanya bagi seniman saja, karena banyak elemen yang tergabung di dalamnya. Salah satu motivasi utama dari JOINT adalah ingin menjadi sarana edukasi politik bagi warga Yogyakarta. Apalagi kuliah praktek politik tidak bisa dengan mudah didapatkan masyarakat melalui institusi-institusi lain yang sebelumnya telah ada seperti partai politik maupun lembaga negara layaknya KPU:

“kan ini belum ada sebelumnya ya, ini jadi praktek buat masyarakat, kan mahasiswa ya banyak jadi relawan, kelompok masyarakat lain juga, enggak bisa ini didapat di kampus. Terus disini juga asik kan seru-seruan, siapa yang nyangka bahwa gerakan kami ini bisa sampai sejauh ini, jadi selain untuk para relawan dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung, ini juga jadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat Jogja” (YN)

Buruknya kinerja partai politik berbuntut panjang pada kualitas pemerintahan Kota Yogyakarta. Kandidat-kandidat yang dihasilkan dari proses yang buruk tersebut nantinya akan berkontestasi dalam pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif. Ketika para kandidat tersebut terpilih, mereka tidak dibekali

kecakapan untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada mereka. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa para kandidat terpilih tersebut bukan menjadi penyalur suara rakyat namun menjadi kepanjangan tangan partai politik guna mencapai tujuan partai politik bersangkutan. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan:

“...idealnya seorang pejabat publik mempunyai kewajiban untuk mengakomodir kepentingan dari konstituennya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pejabat publik justru mengutamakan kepentingan partai politik yang mengusungnya.” (HD)

Realita di atas membuat JOINT meyakini bahwa jalan terbaik untuk segera mengatasi permasalahan di Kota Yogyakarta adalah dengan ikut serta dalam pemilu walikota Kota Yogyakarta pada tahun 2017. Untuk itu JOINT mendasarkan gerakannya pada tiga landasan utama. Tiga landasan tersebut adalah landasan moral yang mengacu pada dua point yakni JOINT mencoba menghadirkan sosok calon pemimpin daerah yang murni dari masyarakat tanpa adanya politik transaksional, dan menawarkan program-program kerja yang menarik bagi masyarakat sebagai tujuan pergerakannya, agar moralitas dalam proses politik

semakin ke arah yang lebih baik. (Imawan, 2018)

Landasan kedua adalah landasan edukasi politik di mana pada riset Imawan (2018) dikatakan bahwa dalam pemilihan walikota 2017, JOINT mengajak masyarakat Yogyakarta untuk memilih secara cerdas dan tidak terpengaruh politik uang. Ketika masyarakat bisa memilih secara cerdas, praktek politik uang dapat diminimalisir atau bahkan tidak ditemukan lagi dalam proses pemilihan umum. Imawan (2018) kemudian menjelaskan bahwa landasan ketiga JOINT adalah landasan politik yang bermartabat di mana JOINT berpandangan bahwa dalam kontestasi politik saat ini, mayoritas calon kandidat ataupun partai politik tidak mempertimbangkan martabat politik. Mereka menggunakan politik uang sebagai langkah untuk menggalang suara demi duduk di kursi kekuasaan. JOINT ingin memupus mata rantai ini tidak hanya di hilirnya (pemilih yang cerdas dan menolak politik uang) tapi juga dengan menjadi pelopor di hulu permasalahan dengan menjauhi praktek politik uang.

Fokus utama yang terlihat dari visi misi JOINT di atas adalah bagaimana pemerintahan yang selanjutnya haruslah memberikan porsi yang besar bagi warga untuk turut serta dalam proses tata kelola

pemerintahan. Untuk mencapai tujuannya tersebut, JOINT memutuskan bahwa mereka harus mengadakan sebuah konvensi yang tujuannya adalah untuk menjaring dan menyaring individu-individu yang dianggap layak untuk memimpin Kota Yogyakarta selama periode lima tahun ke depan. JOINT, meski begitu, sadar bahwa untuk melakukan ‘gawe’ yang besar tersebut dibutuhkan perencanaan yang matang serta sumber daya yang besar pula. Pertama-tama JOINT membutuhkan mesin penggerak organisasi dan oleh karena itu JOINT membuka pintu pendaftaran bagi relawan yang ingin bergabung bersama JOINT dalam upayanya mengadakan konvensi serta mengantarkan calonnya bersaing di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Mayoritas relawan berasal dari kalangan mahasiswa yang jumlahnya mencapai 200-an orang. Relawan JOINT terbagi ke dalam tiga kategori yang memiliki tugasnya masing-masing.

Pertama, relawan administratif yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendata Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari masyarakat Yogyakarta yang ingin mendukung calon independen dari JOINT. Kedua, relawan lapangan yang memiliki fungsi sebagai mediator komunikasi dari masyarakat kepada JOINT terutama terkait

dengan penyampaian ide, harapan, dan aspirasi kepada kandidat JOINT yang terpilih nantinya. Ketiga, relawan kegiatan yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, mengatur kegiatan mulai dari pra-konvensi hingga pada saat konvensi, serta diskusi-diskusi publik. (Imawan, 2018). Selanjutnya JOINT menyaring nama-nama yang dianggap layak untuk menjadi kandidat walikota dan wakil walikota Kota Yogyakarta. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka JOINT membentuk sebuah tim yang memiliki tugas untuk memilih panitia penyeleksi atau anggota panel konvensi yang akan menjangkau para kandidat yang akan mengikuti konvensi. Tim ini terdiri dari Busyro Muqoddas (praktisi hukum), Bambang Eka Cahya Widodo (akademisi atau ahli pemilu), Herry Zudianto (mantan walikota Kota Yogyakarta), Yustina Neni (seniman), dan Suparman Marzuki (praktisi hukum) yang selanjutnya akan disebut sebagai tim 5.

Sekretaris JOINT menjelaskan bahwa sebenarnya pihak JOINT tidak menyangka bahwa orang-orang yang duduk di tim lima maupun Tim 10 menanggapi serius apa yang dilakukan oleh JOINT mengingat mereka adalah orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. JOINT, dengan mesin organisasi

yang mulai berjalan, akhirnya mulai menjalankan programnya kepada semua kandidat yang mereka anggap layak mengikuti konvensi. Dari sekian banyak kandidat yang diusulkan sebanyak lima belas kandidat mengembalikan formulir dan akan mengikuti tahapan-tahapan seleksi yang berujung pada konvensi. Adanya lima belas kandidat yang mengembalikan formulir pencalonan dari JOINT telah melebihi ekspektasi kawan-kawan yang tergabung dalam JOINT.

Setelah konvensi dilakukan, sineas ternama Garin Nugroho bersama dengan Rommy Nugroho terpilih sebagai kandidat yang akan diusung oleh JOINT dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh JOINT adalah mengumpulkan dukungan dari masyarakat dengan cara pengumpulan KTP guna dapat melaju sebagai calon independen. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 Ayat 2 poin B disebutkan bahwa calon independen walikota dan wakil walikota dengan jumlah DPT lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 8,5% dari total warga, di mana pemilih Yogyakarta saat itu berjumlah 298.989 orang sehingga JOINT harus mengumpulkan KTP sebanyak 27.000. Sayangnya hingga batas akhir

pendaftaran kandidat di KPUD Kota Yogyakarta, JOINT hanya mampu mengumpulkan sebanyak 4000-an KTP saja yang akhirnya mengakhiri kisah JOINT dalam pentas politik Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta:

“Sebenarnya kami tinggal selangkah lagi, tapi KTP yang kami kumpulkan jauh dari syarat yang ditetapkan KPU. Memang terkendala, karena dari sekian banyak relawan yang mendaftar hanya belasan yang aktif jadi beban kerjanya memang banyak, saya enggak tau ada faktor lain atau enggak terkait kegagalan dalam mengumpulkan KTP, tapi intinya kami happy-happy aja. Ini proses yang berawal dari keisengan, kami bisa belajar dari banyak orang hebat, bisa seru-seruan, meskipun enggak semuanya bisa tercapai, kan fokusnya edukasi politik untuk masyarakat Jogja” (YN)

Neni selanjutnya mengatakan bahwa pasca kegagalan JOINT dalam mendaftarkan kandidat mereka untuk ikut berkontestasi dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017, kegiatan JOINT di Sekretariatnya otomatis berhenti. Hal ini juga dapat dilihat dari website JOINT yang tidak lagi dapat diakses. Neni menambahkan bahwa memang JOINT yang berasal dari ide “gila” mereka (para pendirinya) tidak diniatkan untuk menjadi organisasi yang permanen dan lebih menyerupai lembaga *ad hoc* yang fungsinya memberikan edukasi politik

pada masyarakat Kota Yogyakarta menjelang Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Dengan berakhirnya rangkaian pilkada tersebut, maka berakhir pulalah kegiatan yang dilakukan JOINT.

Pemanfaatan Media Sosial sebagai Kanal Aspirasi Politik

Komik Media Sosial adalah suatu gerakan atau komunitas komik online yang ada di Kota Yogyakarta. Komik Media Sosial mulai mengawali kegiatannya pada medio 2010-an yang diawali dengan maraknya komik online yang bermunculan di media sosial seperti Instagram. Komik Media Sosial memiliki total 92 anggota yang mayoritas di dalamnya diisi oleh generasi milenial. Jika ditilik dari keanggotannya, maka anggota Komik Media Sosial berasal dari generasi yang lahir di tahun 1990-an dan bahkan ada beberapa anggota yang lahir pada tahun 2000an. Ketika disinggung terkait dengan tujuan dibentuknya komunitas ini, terutama kaitannya dengan ekspresi politik, Saifulloh Ghozali (Ipul) sebagai salah satu komikus itu menyatakan:

“sebenarnya enggak ada niatan khusus, untuk itu (politik) juga enggak ada, karena kami ini seru-seruan, dan karena itu kami lanjut, meskipun begitu kami enggak menutup mata terkait penyampaian aspirasi politik melalui media komik” (SG)

Ipul yang juga ikut mencalonkan dirinya dalam Pemilu Legislatif 2019 yang lalu lantas menyatakan bahwa @stripjogja melalui beberapa punggawanya kerap menghadirkan komik-komik yang yang menyinggung masalah sosial kemasyarakatan. Ketika disinggung tentang keterlibatan @stripjogja dalam mengkampanyekan dirinya dalam Pemilu Legislatif 2019 yang lalu, Ipul mengatakan bahwa gerakan itu bukan inisiatif dan mobilisasi dirinya, Ipul mengatakan:

“Jadi enggak ada sama sekali ya (mobilisasi), temen-temen itu merasa bahwa saya yang paling tau dan mampu untuk menyuarakan aspirasi mereka, jadi kemarin temen-temen itu secara militan mengkampanyekan saya melalui komik-komik mereka, dalam kampanye saya, saya juga mengeluarkan buku komik yang idenya juga berasal dari temen-temen juga, mereka juga membuat komik edukasi politik ya terkait bagaimana mencoblos dengan benar supaya suaranya sah” (SG)

Isu utama yang mendasari gerakan politik dari Komik Media Sosial adalah isu tentang perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap industri kreatif terutama terkait dengan industri komik. Hadirnya salah satu anggotanya sebagai calon legislatif menjadi kesempatan bagi Komik Media Sosial untuk menempatkan calonnya di kursi legislatif dan karena itu pula Komik Media Sosial aktif terlibat

dalam kampanye anggotanya tersebut. Untuk meloloskan pilihannya ke parlemen, anggota Komik Media Sosial aktif dalam mengkampanyekan rekannya tersebut melalui komik-komik yang mereka buat yang kemudian disebarluaskan melalui platform media sosial.

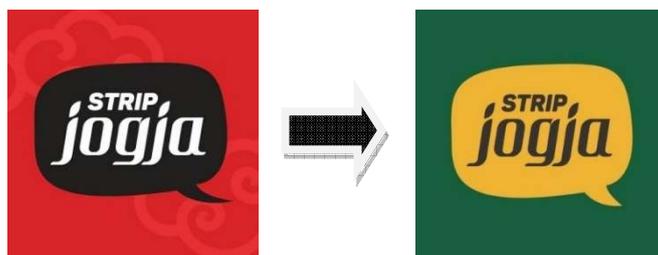
Cukup berbeda dengan JOINT yang dibentuk sebagai lembaga *ad hoc*, komunitas Komik Media Sosial yang hadir melalui @stripjogja adalah suatu komunitas “permanen” yang tidak ditujukan untuk tujuan politik tertentu. Walaupun ada karya-karyanya yang memiliki pesan sosial politik, itu tidak lebih dari wujud perhatian para komikus tersebut terhadap isu-isu sosial politik yang sedang ramai di masyarakat. Hal itu berubah ketika Saifulloh Ghazali, salah satu anggota dari Komik Media Sosial mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Pemilu Legislatif tahun 2019. Komik Media Sosial yang awalnya membatasi keterlibatan mereka dalam politik praktis, kini akhirnya secara tidak langsung masuk ke dalam politik praktis. Saifulloh Ghazali yang akrab disapa Ipul menjelaskan bahwa secara resmi tidak ada dukungan dari Komik Media Sosial terhadapnya. Hanya saja, para anggota dari Komik Media Sosial yang berisikan komikus Jogja merasa bahwa ini momentum bagi mereka

untuk menempatkan wakilnya untuk duduk di parlemen.

Ketika dikonfirmasi, Ipul mengatakan bahwa dirinya rajin mengadakan pertemuan dengan para anggota lainnya yang bertujuan untuk mendiskusikan langkahnya untuk maju sebagai calon legislatif. Selain itu Ipul juga membahas isu-isu umum yang perlu diperjuangkan dan secara khusus isu-isu krusial yang menjadi perhatian para komikus Jogja. Ipul juga menjadikan para komikus ini sebagai *sparring partner* dalam bertukar ide untuk strategi kampanyenya. Setidaknya ada tiga strategi yang Ipul dan teman-teman dari Komik Media Sosial lakukan dalam hal kampanye legislatif pada tahun 2019 yang lalu. Saat ditemui, Ipul menjelaskan tahapan-tahapan yang ia persiapkan terkait pencalonannya sebagai calon anggota legislatif dimana ia mengatakan bahwa tahapan pertama adalah diskusi bersama rekan-rekan Komik Media Sosial terkait pencalonannya sebagai anggota legislatif, yang

dilanjutkan dengan pembahasan strategi kampanye yang menghasilkan dua produk, yaitu kampanye melalui komik online di Instagram @stripjogja dan pembuatan komik cetak. Ipul lebih lanjut mengatakan:

“ada tiga tahap ya mas, pertama kami ngumpul dulu, saya kasih tau niatan saya untuk nyaleg, respon teman-teman positif ya, jadi semenjak itu kami makin sering diskusi dan tukar pikiran terkait bagaimana strategi kampanye saya. Nah dari hasil diskusi itu lah kemudian kita dapat dua strategi ya, yang semuanya memanfaatkan komik sebagai alat kampanyenya namun menggunakan dua media yang berbeda. Jadi pertama teman-teman itu membantu kampanye lewat instagram @stripjogja itu. Materi yang dibawakan pertama adalah tata cara mencoblos yang benar itu seperti apa, ya itu umum ya. Kemudian untuk kampanye saya itu, temen-temen membuat komik yang materinya itu menampilkan diri saya sebagai calon anggota legislatif yang baik. Selanjutnya adalah dengan membuat komik versi cetak yang di dalamnya terdapat karakter saya sebagai calon anggota legislatif, nah itu semua ide dari teman-teman” (SG)



Gambar 1. Perubahan logo akun @stripjogja sebelum dan selama masa kampanye untuk mendukung Saifulloh Ghozali.

Sumber: Akun Instagram @stripjogja, 2019.

Hal yang paling terlihat dari dukungan yang diberikan oleh Komik Media Sosial kepada Ipul tercermin dari perubahan warna logo komunitas selama masa kampanye (Gambar1). Logo @stripjogja yang semula didominasi warna merah, putih, dan hitam berubah menjadi hijau, hitam, dan kuning sesuai dengan warna partai politik Saifulloh Ghozali (PPP).

Ipul kemudian menerangkan bahwa meskipun Komik Media Sosial ini seolah berperan sebagai tim sukses dirinya, namun ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh rekan-rekannya dari Komik Media Sosial Jogja ini berwujud dukungan sukarela yang sifatnya spontan. Ipul juga menjelaskan bahwa ia tidak menjanjikan apapun pada rekan-rekannya kecuali menjadi corong aspirasi bagi mereka andai nantinya terpilih, dan begitu pula rekan-rekan Ipul tidak meminta apapun atas bantuan yang mereka berikan dalam kampanye yang lalu. Ketika dikonfirmasi lebih lanjut, berikut statement yang Ipul berikan:

“enggak ada sama sekali itu (janji-janji), mereka enggak minta apapun ke saya dan saya pun enggak menjanjikan apapun ke mereka. Satu-satunya alasan mereka membantu saya dalam pencalonan saya kemarin itu karena solidaritas antar sesama anggota ya, semangat gotong royong. Selain itu mereka

juga merasa bahwa saya bisa mewakili aspirasi para komikus Jogja karena kami satu komunitas. Jadi enggak ada itu saya mengorganisir, mobilisasi, ini temen-temen spontan saja” (SG)

Gerakan Sosial Ala JOINT dan Komik Media Sosial

Pendekatan yang digunakan oleh kedua gerakan, yakni JOINT dan Komik Media Sosial, berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan situasi yang mereka alami. JOINT dihadapkan pada situasi dimana mereka memulai suatu gerakan yang ujungnya adalah mengusung calon kepala daerah dari jalur independen. Strategi yang digunakan oleh JOINT kemudian terbagi ke dalam tiga tahap, yakni; tahap pra-seleksi, tahap seleksi, dan tahap pasca seleksi. Tahapan pra-seleksi dan tahapan seleksi menunjukkan proses dari munculnya para kandidat, proses seleksi bertahap, hingga akhirnya muncul pasangan kandidat pada diri Garin dan Rommy. Tahapan pasca seleksi menjadi arena pertarungan baru karena JOINT dihadapkan pada tuntutan untuk memenuhi syarat dukungan sebesar 8,5% dari jumlah pemilih atau sekitar 27.000 orang yang dibuktikan dengan KTP. Sayangnya JOINT harus gagal pada tahap ini karena hanya dapat mengumpulkan 4000an suara.

Komik Media Sosial, di sisi lain, dihadapkan pada kondisi dimana calegnya sudah masuk dalam kontestasi di Pemilu Legislatif tahun 2019. Tugas utama mereka adalah membantu proses kampanye kandidat yang kemudian mereka lakukan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan keahlian mereka. Komik yang mereka ciptakan berusaha menyajikan berbagai informasi bagi pemilih yang dapat mempermudah mereka untuk menyalurkan suara kepada Saifulloh Ghozali. Informasi yang disajikan berupa warna surat suara, lambang dan nomor urut partai, serta nama dan nomor urut calon legislatif. Sayangnya jangkauan media sosial yang luas tidak berbanding lurus dengan *nature* dari pemilu legislatif tingkat kota dan kabupaten yang memiliki dapil yang cukup kecil.

Konsep yang dihadirkan oleh Farley (1992) menggambarkan fase gerakan sosial ke dalam tiga tahap. Fase pertama adalah fase organisasi yang mengacu pada proses pembentukan yang dicirikan dengan penekanan atas eksistensi mereka, perekrutan anggota, dan juga aksi-aksi. Fase kedua adalah fase institusionalisasi yang dicirikan dengan pembentukan kantor dan struktur organisasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan gerakan sosial tersebut. Fase ketiga adalah fase surut

yang dicirikan dengan makin merosotnya aktivitas dari gerakan sosial tersebut yang diakibatkan oleh berbagai macam hal seperti kehilangan sosok pemimpin, konflik internal, hilangnya dukungan masyarakat, atau bahkan karena tujuannya telah tercapai.

Melihat JOINT sebagai sebuah gerakan sosial melalui kaca mata Farley akan menghasilkan gambaran yang kemudian dapat dikategorikan ke dalam tiga fase tersebut. Fase pertama terjadi saat ketika sekelompok seniman dan berbagai kelompok lain di masyarakat menyuarakan keresahan mereka atas kondisi kepemimpinan politik terutama mendekati Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Hal ini dilanjutkan dengan proses bergabungnya para relawan, akademisi, praktisi dari berbagai bidang untuk menyuarakan kekhawatiran yang sama dan di fase ini pulalah JOINT mulai menarik perhatian masyarakat luas.

Fase kedua dialami oleh JOINT ketika secara struktur JOINT mulai membentuk kesekretariatan dimana Yusnita Neni terpilih sebagai sekretaris dan cafenya terpilih sebagai kantor sekretariat. Pada fase ini pula lah JOINT kemudian membentuk tim panel seleksi yang tujuannya adalah menjaring dan menyaring calon dalam konvensi yang

akan diadakan nantinya. Konvensi JOINT menjadi puncak fase ini dimana konvensi tersebut menjadi pertanda bahwa JOINT berada pada trek yang benar dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Fase ketiga ditandai dengan kegagalan JOINT untuk memperoleh dukungan yang cukup guna meloloskan kandidatnya untuk ikut serta dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Pasca kegagalan JOINT dalam meloloskan kandidatnya, secara perlahan JOINT mulai menghentikan kegiatannya. JOINT, meski begitu, tidak hanya mengalami fase surut ini karena kegagalan mereka tersebut, tapi juga karena tujuan mereka yang lain, yakni edukasi politik bagi masyarakat Yogyakarta, telah tercapai.

Hal yang menarik hadir dari kasus Komik Media Sosial dimana sejatinya komunitas ini tidak dibentuk untuk menjadi sebuah gerakan yang mencirikan gerakan sosial. Komik Media Sosial, meski begitu, mengalami transformasi kilat akibat momentum yang hadir di hadapan mereka. Untuk itu kita harus memandang Komik Media Sosial bukan dari gambarannya sebagai komunitas komikus saja, tapi sebagai gerakan komikus yang bertujuan untuk memenangkan kursi legislatif. Proses tersebut dimulai dengan pencalonan Saifulloh Ghozali

sebagai calon anggota legislatif. Inilah yang kemudian menjadi fase pertama dalam gerakan sosial para komikus ini. Pada fase pertama ini, yang menjadi fokus bukanlah proses pembentukan dan pencarian anggota mengingat Komik Media Sosial adalah komunitas yang telah berdiri jauh sebelum gerakan politik mereka dimulai. Fokus yang ditekankan pada fase pertama adalah tumbuhnya kesadaran akan posisi politik mereka yang berujung pada pelaksanaan aksi. Aksi yang dimaksud adalah konsolidasi yang dilakukan oleh Saifulloh Ghozali dengan rekan-rekannya di Komik Media Sosial.

Fase kedua bagi Komik Media Sosial berbeda dengan gerakan sosial lainnya mengingat mereka berasal dari organisasi yang sudah *established*. Fase kedua dari gerakan yang dilakukan oleh Komik Media Sosial dimulai ketika Komik Media Sosial mulai menyusun langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan mereka yang ditandai dengan penetapan strategi kampanye bagi Saifulloh Ghozali. Fase ketiga dari Komik Media Sosial ditandai dengan selesai tugas mereka dalam mengampanyekan Saifulloh Ghozali dan Komik Media Sosial yang berwujud sebagai gerakan sosial politik kembali kepada bentuk awalnya sebagai komunitas seniman komik yang aktif di media sosial.

Alur pendanaan yang ditunjukkan baik oleh JOINT maupun Komik Media Sosial mayoritas berasal dari pendanaan pribadi para anggotanya. Hal yang membedakan antara keduanya adalah metode pengumpulan dana tersebut. Jika Komik Media Sosial mewajibkan anggotanya untuk membayar iuran per bulan, maka di JOINT pemberian dana pribadi kepada organisasi bersifat sukarela tanpa ada kewajiban iuran. Selain itu, jangkauan program kerja yang lebih luas membuat JOINT memiliki jejaring yang lebih luas dalam hal kemampuan untuk menarik para donatur, dimana donatur JOINT berasal dari berbagai kelompok masyarakat.

Komik Media Sosial, di sisi lain, memiliki jangkauan yang tidak terlalu luas dalam hal pengumpulan donasi ini dimana mereka hanya mengandalkan sektor usaha terkait seperti lembaga percetakan sebagai donatur mereka. Terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana organisasi, keduanya tidak merinci bagaimana laporan tersebut dibuat, namun kedua organisasi sama-sama menerapkan prinsip gotong-royong dan keterbukaan sehingga setiap anggotanya tahu terkait penggunaan dana organisasi tersebut.

KESIMPULAN

JOINT maupun Komik Media Sosial termasuk gerakan sosial baru di mana mereka tidak lagi berkutat pada isu-isu perebutan sumber-sumber ekonomi layaknya gerakan buruh dan tani yang menuntut hak atas kepemilikan tanah maupun alat produksi yang merupakan contoh gerakan sosial lama. JOINT dan Komik Media Sosial hadir akibat dari krisis kepercayaan terhadap elit yang berkuasa, dimana JOINT ingin menghadirkan calon independen di Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 sedangkan Komik Media Sosial mendukung calonnya pada Pemilu Legislatif tahun 2019.

Kota Yogyakarta yang menjadi basis pergerakan keduanya memiliki karakteristik utama berupa kota kecil yang sarat akan nilai budaya dan seni sehingga JOINT dan Komik Media Sosial merupakan gerakan sosial baru yang dilahirkan oleh para seniman. Para seniman ini menjadikan ajang pemilu sebagai momentum dan jalan untuk merubah Kota Yogyakarta menjadi lebih baik. Setelah orde baru runtuh dan seniman kehilangan media ekspresi politiknya, JOINT dan Komik Media Sosial menjadi wadah baru bagi para seniman Kota Yogyakarta untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Oleh

karenanya, baik JOINT dan Komik Media Sosial lebih banyak mengangkat kegelisahan atas isu-isu publik yang ada di Kota Yogyakarta seperti minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota, permasalahan perijinan hotel ataupun kepedulian pemerintah kota terhadap seniman.

JOINT memulai fase organisasi sejak pembentukannya dan juga aksi-aksinya dalam menggaet pakar-pakar dari berbagai bidang untuk melakukan seleksi kandidat. Sedangkan Komik Media Sosial memulai fase organisasi saat munculnya kesadaran akan perlunya komunitas ini untuk memiliki keterwakilan di parlemen. Fase institusionalisasi, JOINT melanjutkan dengan pembentukan kesekretariatan dan perekrutan relawan hingga akhirnya menuju konvensi. Fase institusionalisasi pada Komik Media Sosial ditunjukkan dengan perencanaan yang dilakukan untuk mengampanyekan Saifulloh Ghozali agar dapat terpilih sebagai anggota parlemen. Fase surut pada JOINT ditunjukkan melalui makin minimnya kegiatan yang dilakukan oleh JOINT pasca Pilkada dan dengan tercapainya edukasi politik bagi warga Kota Yogyakarta. Fase surut kemudian ditunjukkan Komik Media dengan berakhirnya kegiatan politik Sosial pasca pemilu legislatif 2019.

JOINT dan Komik Media Sosial dihadapkan pada tantangan-tantangan dalam proses pergerakannya. JOINT yang hadir menjelang Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 menggunakan konvensi sebagai sarana penyeleksian kandidat dan kemudian menggalang dukungan melalui pengumpulan KTP. Pada proses inilah JOINT menemui kendala karena sampai batas akhir waktu pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, JOINT gagal memenuhi syarat dukungan KTP tersebut.

Komik Media Sosial, di sisi lain, sedari awal telah memiliki kandidat yang akan mereka dukung dan kampanye menjadi fokus utama bagi mereka. Komik Media Sosial dihadapkan pada kenyataan bahwa kampanyenya di media sosial, meskipun memiliki jangkauan yang luas, tapi gagal untuk fokus ke dapil di mana kandidat mereka terdaftar.

Terkait pendanaan, keduanya sama-sama mengandalkan dana dari kantong pribadi. Hal yang menjadi pembeda adalah JOINT memiliki jangkauan yang lebih luas atas donatur sedangkan Komik Media Sosial terbatas hanya pada sektor-sektor usaha yang erat kaitannya dengan aktifitas kesenian mereka seperti lembaga-lembaga percetakan.

REFERENSI

- Arianto, B. (2015). Kampanye kreatif dalam kontestasi presidensial 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(1), 16-39.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage publications.
- Farley, J. E. (1992). *Sociology*. New Jersey: Prentice.
- Imawan, A. P. (2018). *Politik Relawan Di Indonesia: Eksperimen Komunitas Relawan Menjelang Pilwakot Yogyakarta Tahun 2017*. Yogyakarta: Penerbit Polgov.
- Ishiyama, J. T., Breuning, M., & Syaifuddin, A. F. (2013). *Ilmu Politik: Dalam Paradigma Abad ke-21 (Sebuah Referensi Panduan Tematis) Jilid 1*. Yogyakarta: Prenada Media.
- Iswandi, H. (2016). Seni Mural Sebagai Unsur Politik Dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Seni, Desain dan Budaya*, 1(1), 9-14.
- Kresna, M. (2016). *JOINT Dorong Munculnya Calon Walikota Independen Di Yogyakarta*. Diambil dari: <http://www.rappler.com/indonesia/127631-joint-dorong-calon-walikota-yogyakarta-independen>. Diakses pada 28 April 2017.
- Klandermans, B. (2005). *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial*, (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Most, G. W. (2011). What Ancient Quarrel Between Philosophy And Poetry?. In *Plato and the Poets* (pp. 1-20). Leiden-Boston: Brill.
- Ranciere, J. (2013). *Aisthesis: Scenes From The Aesthetic Regime Of Art*. London-New York: Verso.
- Rianto, J. (2009). Interaksi Seni Pertunjukan Wayang Dan Politik. *Gelar: Jurnal Seni Budaya*, 7(1), 1-14.
- Setiawan, I. (2010). Merah Berpendar di Brang Wetan: Tegangan Politik 65 dan Implikasinya terhadap Industri Musik Banyuwangen. *Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, 8(1), 116-135.
- Situmorang, A. W. (2013). *Gerakan Sosial: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarrow, S. G. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Prakarsa, P., & Triwibowo, D. (2006). *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Wilson, J. (1973). *Introduction to Social Movements*. New York: Basic Book Inc.
- Zhdanov, A. (1998). From Speech At The First All-Union Congress Of Soviet Writers 1934. In *Modernism: An Anthology Of Sources And Documents* Ed. Vassiliki Kolocotroni, Jane Goldman, Olga Taxidou. Chicago: The University Of Chicago Press.